

# **PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DAN KOMPETENSI PELAKU PENGADAAN TERHADAP TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BERULANG PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN**

**Liilzam Nuur<sup>1</sup>, Rahmat Yuliansyah<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

[ilzamnuur@gmail.com](mailto:ilzamnuur@gmail.com); [Rahmat.Yuliansyah@stei.ac.id](mailto:Rahmat.Yuliansyah@stei.ac.id)

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh penerapan *E-procurement* dan kompetensi pelaku pengadaan terhadap tender pengadaan barang dan jasa yang berulang pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan penerapan *E-procurement* (PE) dan kompetensi pelaku pengadaan (KP) sebagai variabel bebas dan tender pengadaan barang dan jasa yang berulang (TD) sebagai variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner dengan 5 skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Sampel yang digunakan ditentukan berdasarkan penelitian multivariate, dengan jumlah sampel sebanyak 50 pegawai. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang menjadi sampel. Teknik analisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) penerapan *E-procurement* berpengaruh terhadap tender pengadaan barang dan jasa yang berulang pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, (2) kompetensi pelaku pengadaan berpengaruh terhadap tender pengadaan barang dan jasa yang berulang pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

**Kata Kunci:** *E-Procurement*, Kompetensi Pelaku Pengadaan, Tender Pengadaan Barang dan Jasa Berulang, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Perpres 16 tahun 2018,

## I. PENDAHULUAN

Akhir Semester 1 tahun 2016 penyerapan anggaran di lingkungan kementerian/lembaga negara mengalami perlambatan, padahal percepatan belanja barang dan modal sangat diharapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran hingga akhir Mei 2016 hanya terserap Rp691,6 triliun atau 33% dari pagu senilai Rp2.095,7 Triliun, sedangkan realisasi penyerapan kementerian/lembaga sebesar Rp82 triliun atau 10,6% pada triwulan I-2016. Selain itu, Humas Sekretariat kabinet dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Semester I tahun 2016 menjelaskan 16 K/L memiliki daya serap sedang, yaitu antara 27,5% sampai dengan 34,2% dan 30 K/L memiliki daya serap rendah, yaitu berada di capaian kurang dari 27,5%.

Dalam penelitian menggunakan sampel tujuh kementerian/lembaga terbesar pengelola belanja di Indonesia terdapat empat penyebab utama rendahnya penyerapan belanja, yaitu persoalan internal K/L, persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, serta persoalan lain-lain. Dalam uraian terkait persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa terdapat 12 faktor penyebab permasalahan, sehingga berdampak tertundanya pelaksanaan/ penyelesaian dari pengadaan barang dan jasa (Siswanto, 2011: 9).

Pengadaan barang dan jasa yang tertunda juga terjadi di Kementerian Keuangan. Pada tender pengadaan yang tertunda ini tidak hanya dilakukan sampai pengulangan kedua, namun lebih dari itu. Meskipun trennya mengalami penurunan. Hal ini nampak pada tabel berikut:

**Tabel I. Pengulangan Pengadaan per Tahun Kementerian Keuangan**

No	Tahun	Pengulangan Tender Pengadaan Ke-				lebih dari 5
		2	3	4	5	
1	Tahun 2012	353	57	5	2	0
2	Tahun 2013	97	26	8	1	0
3	Tahun 2014	64	15	4	0	0
4	Tahun 2015	79	16	7	2	3
5	Tahun 2016	36	7	4	0	0

Sumber: LPSE Kemenkeu

Di dalam Kementerian Keuangan, terdapat enam unit eselon I yang memiliki kantor daerah yang tersebar diseluruh Indonesia. Unit kerja eselon I tersebut adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dari enam unit eselon I tersebut, pada tahun 2018 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan adalah unit eselon I yang memiliki Pagu DIPA tertinggi di Kementerian Keuangan. Mengingat Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan juga sebagai pengguna barang dan pengguna anggaran Kementerian keuangan, hal ini yang menjadikan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai *locus* dalam penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini dengan Karyasa *et al.* (2014: 19) adalah penelitian ini menguji penerapan E-Procurement, kompetensi pelaku pengadaan terhadap tender pengadaan berulang di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Penelitian sebelumnya hanya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gagal tender di Kabupaten Badung. Selain itu penulis belum menemukan pengaruh variabel-variabel independen tersebut dalam penelitian yang lain.

Dari keterangan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyebab terjadinya tender pengadaan barang/jasa yang berulang dengan judul **“Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Kompetensi Pelaku Pengadaan Terhadap Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Berulang Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan”**

**Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *E-Procurement* berpengaruh terhadap tender pengadaan barang/jasa yang berulang di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?
2. Apakah kompetensi pelaku pengadaan berpengaruh terhadap tender pengadaan barang/jasa yang berulang di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?

**II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Teori Barang Publik**

Pyndick (1996) pada Iskandar (2013: 14) menjelaskan pengertian barang publik adalah “barang yang dapat diproduksi dengan murah untuk konsumen, tetapi sekali barang tersebut diproduksi maka sulit melarang orang lain untuk menggunakannya. Pasar tidak selalu dapat menyediakan barang publik, karena barang publik harus disediakan dalam harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah dapat menyelesaikan masalah barang publik ini dengan menyediakannya atau memberikan insentif kepada pihak swasta untuk memproduksinya.”

Selanjutnya, Case (2008: 351) menjelaskan definisi barang publik adalah “barang yang memiliki karakteristik *non-excludable* dan *non-rivalry* dalam konsumsinya. *Nonexcludable* artinya orang lain tidak dapat dikeluarkan dari pemakaian suatu barang publik, misalnya dalam pertahanan negara yang disediakan untuk seluruh masyarakat dan tidak bisa melarang orang lain untuk tidak mendapatkannya. *Nonrivalry* berarti bahwa konsumsi yang kita lakukan tidak mempengaruhi orang lain dalam mengkonsumsi suatu barang, kita dapat mengkonsumsi tetapi tidak mengurangi barang tersebut dan masih dapat dikonsumsi orang lain secara utuh.”

Paparan diatas menjelaskan bahwa barang publik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya, dan masyarakat memiliki hak untuk menggunakannya. Penyediaan barang publik tersebut diatur dalam mekanisme pengadaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16 tahun 2018) tentang pengadaan barang dan jasa. E-Procurement sendiri merupakan amanat dari Perpres 16 tahun 2018 yang pada intinya menjadikan seluruh pengadaan baik itu pengadaan langsung maupun pengadaan melalui tender menjadi elektronik. Maka dari itu, Teori Barang Publik dapat menjadi dasar teori terhadap pelaksanaan E-Procurement di lingkungan Setjen Kemenkeu.

**2.1.2 Teori Efektivitas**

Efektivitas secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris *effectiveness*, yang memiliki arti keberhasilan. Arti kata efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> berarti keefektifan, atau sesuai dengan kegunaan. Hall (1980: 536) menyebutkan “efektivitas organisasi ialah pertanyaan paling tinggi terhadap riset-riset mengenai organisasi. Efektivitas akan menjadi variabel dependen yang akan diurai, dijelaskan, dicari, dan bahkan ditentang”. Masih dalam penelitian yang sama, Hall menjelaskan dua macam model dalam efektivitas organisasi, yaitu model tujuan dan model perolehan sumber daya. Model tujuan menjelaskan bahwa sejauh mana organisasi memahami tujuan organisasi yang akan dicapainya, sedangkan model perolehan sumber daya berlandaskan upaya organisasi untuk meraihnya. Faisol et. al (2014: 74) menerangkan “efektivitas *E-Procurement* yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.”

Tender pengadaan barang/jasa yang berulang senada dengan teori efektivitas model tujuan dari Hall (1980: 536) serta definisi efektivitas *E-Procurement* menurut Faisol et. al.(2014: 74). Hal ini dikarenakan pada dasarnya, pengadaan barang/jasa sudah ditetapkan oleh organisasi bahkan sebelum tahun anggaran berjalan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan/atau Lembaga (RKAK/L). Peraturan Pemerintah RI nomor 21 Tahun 2004 menjelaskan definisi dari

RKAK/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

### 2.1.3 Penerapan E-Procurement

Vaidya *et al.* (2006: 72) mendefinisikan “*E-Procurement* adalah *the use of Internet-based (integrated) information and communication technologies (ICTs) to carry out individual or all stages of the procurement process including search, sourcing, negotiation, ordering, receipt, and post-purchase review*”. Purwanto (2008: 46) sendiri menerangkan “*E-Procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan efektif, efisien dan terintegrasi”. Ditambah, Pasal 1 angka 37 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa *E-Procurement* dalam penelitian ini adalah Sistem informasi yang terintegrasi internet, memuat seluruh proses pengadaan barang dan jasa dalam bentuk elektronik dan tersimpan di suatu pusat data di mana pelaksanaannya diatur oleh ketentuan perundang-undangan demi menghasilkan pengadaan yang efektif dan efisien.

### 2.1.4 Teori Kompetensi

Davis (2009: 299) dalam Busro (2018: 25) menguraikan bahwa “*competency is a capability perspective and people knowledge, especially to impact on ability for need in a business via minimize cost and optimalization services to customer more for less*”. Kompetensi adalah perspektif kemampuan dan pengetahuan manusia, khususnya kemampuan untuk berbagi kebutuhan dalam bisnis dengan meminimalisasi biaya dan mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan tidak lebih, bukan kurang. Spencer dalam Astuti (2012: 65) menjelaskan “kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu”.

Menurut Mc.Clelland dalam Sedarmayanti (2011:126), “kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang outstanding performers lakukan lebih sering, pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan penilai kebijakan”.

Kompetensi bisa di analogikan seperti “gunung es” dimana keterampilan dan pengetahuan membentuk puncaknya yang berada di atas air. Bagian di bawah permukaan air tidak terlihat mata, namun menjadi fondasi dan memiliki pengaruh terhadap bentuk bagian yang berada di atas air. Peran sosial dan citra diri berada pada bagian “sadar” seseorang, sedangkan motif seseorang berada pada alam “bawah sadar”nya.

Penjelasan masing – masing kompetensi menurut Mc. Clelland adalah :

1. Keterampilan : keahlian/kecakapan melakukan sesuatu/tugas tertentu dengan baik,
2. Pengetahuan : informasi yang dimiliki/ dikuasai seseorang dalam bidang tertentu.
3. Peran sosial : citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain
4. Citra diri : persepsi individu tentang dirinya.
5. Sifat /ciri : karakteristik yang relatif konstant pada tingkah laku seseorang.
6. Motif : dasar konstan yang mendorong individu bertindak/berperilaku.

Kemudian, Kompetensi menurut Perpres 16 tahun 2018 adalah kemampuan pejabat dalam mengelola pekerjaannya dengan berprinsipkan pada efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan jaminan sertifikat sebagai bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat Perpres 16 tahun 2018) menjelaskan pelaku pengadaan yaitu, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, dan PjPHP/PPHP.

Definisi masing-masing organisasi pengadaan dijelaskan pada pasal 1 Perpres 16 tahun 2018. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

## **2.2 Pengembangan Hipotesis**

Dari pentingnya penerapan *E-Procurement* terhadap kesuksesan pengadaan beserta kontradiksi dengan kegagalannya, serta melihat fenomena masih banyaknya tender pengadaan yang berulang di Setjen Kemenkeu, maka penulis mengajukan hipotesis terkait dengan variabel Penerapan *E-Procurement* sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Penerapan *E-Procurement* terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya tender pengadaan yang berulang di Setjen Kemenkeu.**

Astuti (2012: 78) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa “kompetensi PPK baik secara parsial maupun secara simultan dengan perubahan sistem pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai di bidang pengadaan barang dan jasa”. Berbeda dengan Astuti (2012: 78), Herriyanto (2012: 77) menyebutkan bahwa “kompetensi SDM pelaksana di dalam Pemprov DKI Jakarta bidang pengadaan berada di urutan pertama sebagai faktor SDM dalam mempengaruhi keterlambatan penyerapan belanja, terutama belanja modal”. Dari penelitian-penelitian di atas, penulis berpendapat jika kompetensi SDM pelaksana menjadi faktor penyebab keterlambatan penyerapan belanja modal, maka kompetensi pelaku pengadaan juga berpengaruh terhadap terjadinya tender pengadaan yang berulang. Dari uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis terkait dengan variabel kompetensi pelaku pengadaan adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Kompetensi pelaku Pengadaan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya tender pengadaan yang berulang di Setjen Kemenkeu.**

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Strategi Penelitian**

Strategi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data (primer) dari responden/peserta. Penulis memilih strategi penelitian kuesioner karena memiliki beberapa keuntungan seperti disebutkan Sukardi (2012, 45) yaitu: Dapat mengungkapkan tanggapan atau pendapat responden baik secara personal maupun kelompok terhadap permasalahan.

1. Dapat disebar atau didistribusikan kepada responden dengan mudah mengingat responden dalam penelitian ini adalah pelaku pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal

Kementerian Keuanganyang memiliki kantor pusat dan kantor daerah dari Sumatra sampai Papua.

2. Dapat menjaga objektivitas responden dari pengaruh luar terhadap satu permasalahan yang diteliti.
3. Dapat menjaga dan terjaminnya kerahasiaan responden untuk menjawab sesuai dengan pendapat sendiri.

### 3.2. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2008: 80) menjelaskan pengertian populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas kareakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Maka dari itu, populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap/Pegawai Negeri Sipil yang berada di unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia.

Melanjutkan dalam buku yang sama, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk dapat mengetahui pengaruh penerapan *E-Procurement*, dan kompetensi pelaku pengadaan terhadap terjadinya tender pengadaan barang/jasa yang berulang, penulis memilih menggunakan metode *purpose sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Syarat khusus yang melandasi pemilihan sampel adalah responden harus aktif dan menjabat salah satu pada organisasi pengadaan yaitu, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, dan PjPHP/PPHP. Hal ini bertujuan agar data yang akan digunakan dalam penelitian dapat menggambarkan kondisi paling terkini akan situasi pengadaan yang ada di dalam Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Maka dari itu, penulis mengirimkan kuesioner kepada anggota organisasi pengadaan yang aktif di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang tersebar di seluruh unit vertikal/ kantor daerah di seluruh Indonesia. Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006: 264) menjelaskan “untuk penelitian *multivariate*, ukuran sampel yang digunakan sebaiknya minimal 10 kali lebih besar dari jumlah variabel yang ada dalam penelitian”. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen, sehingga sampel yang dipersyaratkan minimal dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 responden.

### 3.3 Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer serta metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah survey dengan menyebarkan kuesioner, serta ditambah dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah data, artikel, jurnal, maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini dan kuesioner merupakan seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang disebar berupa daftar pertanyaan tertulis yang sudah disusun berdasarkan indikator-indikator yang sesuai. Masing-masing variabel tersebut disiapkan dengan pertanyaan yang berbeda-beda substansinya. Kuesioner akan disebar secara langsung maupun elektronik (*google form*) kepada responden dan mengumpulkannya pada waktu yang telah disepakati.

### 3.4. Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini dibagi menjadi dua hal, yaitu variabel bebas/independen dan variabel terikat/dependen. Penjelasan akan variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut ini.

#### 3.4.1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari dua hal, yaitu penerapan *E-Procurement* dan kompetensi pelaku pengadaan.

##### a. Penerapan *E-Procurement*

Penerapan *E-Procurement* adalah berubahnya proses tender pengadaan barang/jasa dari manual menjadi secara elektronik melalui aplikasi SPSE. Variabel penerapan *E-Procurement* (PE) diukur dengan tiga indikator besar yang telah digunakan oleh Khafid (2013: 31), yaitu:

- 1) manajemen kontrol dan pemusatan data,
- 2) kualitas hasil dan produksi, dan
- 3) hubungan dengan mitra kerja.

Dari tiga indikator tersebut, penulis menjadikannya menjadi lima pertanyaan di dalam kuesioner untuk PE yang sesuai dan mendukung kemungkinan terjadinya tender pengadaan barang/jasa yang berulang. Pertanyaan tersebut dalam adalah:

- 1) Pemusatan manajemen kontrol dan pemusatan pengamanan data membuat pelaksanaan tender menjadi lebih lama.
- 2) Standarisasi proses dan dokumen (standar bidding) menjadikan pelaksanaan tender harus selesai lebih lama.
- 3) Proses pengadaan yang lebih kompetitif secara digital menjadikan selesainya pengadaan secara elektronik (kadang) berbeda dengan RUP.
- 4) Kewajiban pengadaan yang bersih, transparan dan adil menyebabkan tender pengadaan elektronik beberapa kali harus diulangi.
- 5) Peningkatan optimalisasi pengadaan demi prinsip efektivitas dan efisiensi menyebabkan proses tender pengadaan selesai kadang-kadang lebih dari estimasi waktu awal (perencanaan).

**b. Kompetensi Pelaku Pengadaan**

Kompetensi Pelaku pengadaan adalah kompetensi dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, dan PjPHP/PPHP yang berperan dalam proses pengadaan barang/jasa berdasarkan pada tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis maupun operasional dari berbagai latar belakang. Variabel kompetensi pelaku (KP) disusun berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Wibowo (2007: 113) dalam Taufik (2016: 15) menjadi lima pertanyaan dengan mempertimbangkan teori kompetensi dan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut yaitu:

- 1) Tender pengadaan yang tertunda/berulang kadang disebabkan karena faktor pengetahuan tentang proses pengadaan.
- 2) Kemampuan dan pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan Pengadaan menjadikan selesainya pengadaan menjadi tidak tertunda.
- 3) Komunikasi yang baik sesama rekan kerja membuat pengadaan selesai tidak tertunda.
- 4) Tender pengadaan yang terlambat beberapa kali disebabkan karena faktor ketrampilan dalam bidang tugas pengadaan.
- 5) Pemahaman yang kurang menyeluruh terkait dengan aplikasi dan sistem Teknologi Informasi lainnya menjadikan pengadaan berbeda dengan RUP.

**3.4.2. Variabel Terikat**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tender pengadaan barang/jasa yang berulang. Menurut Pasal 51 Perpres 16 Tahun 2018, tender pengadaan barang/jasa dapat diulangi prosesnya jika tender/Seleksi dinyatakan gagal. Ketika tender pengadaan tahap pertama telah dinyatakan gagal sesuai dengan pasal 51 Perpres 16 tahun 2018, maka pelaku pengadaan dapat melakukan evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, atau tender/seleksi ulang.. Instrumen yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ini adalah sesuai dengan penelitian Karyasa (2014: 25), sehingga dijabarkan dalam bentuk lima pertanyaan dalam kuesioner dengan garis besarnya adalah:

- 1) ketidaksiapan akan E-Procurement,
- 2) dokumen pengadaan berbeda dengan isi surat penawaran,
- 3) pelaksanaan berbeda dengan Perpres pengadaan,
- 4) flutuasi harga terhadap Harga Perolehan Sendiri (HPS), dan
- 5) jaringan internet pendukung.

Sehingga menjadi pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Ketidaksiapan terhadap sistem tender secara elektronik menjadikan pengadaan menjadi beberapa kali tertunda.
- 2) Aplikasi pengadaan elektronik terlalu rumit serta minimnya sosialisasi dari LPSE Kemenkeu / Kantor Pusat sehingga pelaksanaan pengadaan beberapa kali mengalami kesulitan.
- 3) instruksi yang jelas sudah diberikan, namun Dokumen pengadaan dari penyedia barang/jasa hasilnya berbeda dengan isi dari surat penawaran.
- 4) Petunjuk pelaksanaan sudah disampaikan, namun beberapa pelaksanaan pengadaan berbeda dengan ketentuan PERPRES tentang pengadaan.
- 5) Fluktuasi harga mempengaruhi penyusunan HPS yang tepat.
- 6) Jaringan internet pendukung pengadaan kurang memadai.

#### 3.4.3. Cara Pengukuran Variabel

Pengumpulan data di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner dalam skala *likert*, yaitu skala satu sampai dengan lima untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak dengan pernyataan. Skala tersebut terdiri dari: Skor 1= sangat tidak setuju (STS), Skor 2= tidak setuju (TS), Skor 3= Netral/ragu-ragu (N/RR), Skor 4= setuju (S), dan Skor 5= sangat setuju (SS). Data yang diperoleh dari kuesioner merupakan data ordinal. Data ordinal adalah data kuantifikasi hasil konversi kuesioner menjadi data berupa angka. Dalam prosedur statistik, seperti uji t, uji F, regresi, dan lain sebagainya, mengharuskan data berskala interval. Oleh karena itu, data akan diubah dari skala ordinal ke skala interval menggunakan *Method Successive Interval* dengan bantuan program Excel.

#### 3.5. Metoda Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independen yang terdiri dari penerapan *E-Procurement* dan kompetensi pelaku pengadaan terhadap variabel dependen tender pengadaan barang/jasa yang berulang. Teknik regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah disusun. Penjelasan lengkap untuk teknik-teknik pengujian adalah sebagai berikut ini.

##### a. Pengujian Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengetahui hasil jawaban responden secara terperinci. Metode statistik deskriptif ini terdiri dari:

##### 1) Tabel Frekuensi.

Membuat tabel frekuensi berarti mendistribusikan data ke dalam beberapa kelas atau kategori, kemudian menentukan banyaknya pengamatan yang masuk kelas tertentu yang disebut frekuensi kelas. Manfaat dengan adanya tabel frekuensi adalah mempermudah dalam proses analisis sebab data telah terkelompok dan dapat langsung dibaca hasilnya.

##### 2) Analisis Tingkat Persetujuan.

Sugiyono (2008: 94) menyebutkan, untuk memudahkan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor dengan skala ordinal sebagai berikut:

Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5;

Jawaban Setuju (S) diberi skor 4;

Jawaban Netral/Ragu-ragu diberi skor 3;

Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2;

Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

Dilanjutkan, skor dari setiap jawaban responden ini juga dianalisis untuk mendapatkan persentase tingkat persetujuan responden yang cara penghitungannya menggunakan metode yang dijelaskan sebagaimana contoh berikut:

Jumlah skor untuk 25 orang yang menjawab SS =  $25 \times 4 = 100$

Jumlah skor untuk 40 orang yang menjawab S =  $40 \times 3 = 120$

Jumlah skor untuk 20 orang yang menjawab TS =  $20 \times 2 = 40$

Jumlah skor untuk 10 orang yang menjawab STS =  $15 \times 1 = 15$

Jumlah total 100 orang yang menjawab = 275

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = 4 x 100 = 400 (seandainya semua menjawab SS). Jumlah skor yang diperoleh di atas adalah 275. Jadi, berdasarkan data tersebut, maka besarnya tingkat persetujuan responden adalah  $(275 : 400) \times 100\% = 68,75\%$ . Hal ini berarti bahwa 68,75% responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut (positif) dan sisanya sejumlah 31,25% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut (negatif).

**3) Ukuran Pemusatan.**

Ukuran pemusatan adalah sebarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data, yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua (populasi) atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga dapat mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan.

Ukuran pemusatan yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai dengan frekuensi terbanyak atau rata-rata letak (*modus* yang dihitung dengan menggunakan alat bantu program SPSS. *Mean* menunjukkan nilai rata-rata dari seluruh jawaban. Pada penelitian ini, *mean* diartikan sebagai wakil dari persepsi yang mendekati sebenarnya (dapat mewakili persepsi keseluruhan responden) terhadap variabel-variabel yang diukur menggunakan instrumen kuesioner.

**4) Skor Likert Rata-rata.**

Skor Likert rata-rata merupakan nilai rata-rata hitung, yaitu nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan tiap data (jawaban) dibagi dengan banyaknya data. Dalam Sugiyono (2008: 93) menyatakan bahwa perhitungan nilai rata-rata hitung untuk data yang belum dikelompokkan ke dalam daftar distribusi frekuensi dinyatakan dengan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum xi}{n} = \frac{x_1+x_2+x_3+\dots+x_n}{n} \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{rumus interval} = \frac{X_{max}-X_{min}}{n} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Dari hasil perhitungan rumus interval tersebut di atas, maka disusun tabel interpretasi hasil skala *likert* sebagai berikut:

No	Nilai Skor Likert Rata-rata	Intepretasi
1	1,00 - 1,8	Sangat Tidak setuju
2	1,81 - 2,60	Tidak Setuju
3	2,61 - 3,40	Netral / Ragu-ragu
4	3,41 - 4,20	Setuju
5	4,21 - 5,00	Sangat Setuju

**5) Uji Validitas.**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Dalam penelitian ini, validitas instrumen diuji melalui Uji Korelasi *Product Moment* (Pearson). Cara kerjanya adalah dengan mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor total. Penilaian dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Pengukuran dilakukan dengan uji dua sisi dengan sig. 0,05.

**6) Uji Reliabilitas.**

Uji reliabilitas digunakan untuk menjamin bahwa instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsisten, dan stabil. Uji reliabilitas instrumen akan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* untuk setiap instrumen.

**b. Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis ini terdiri dari uji asumsi klasik dan uji *Goodness of Fit* Model Penelitian.

1) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji ini untuk meyakinkan bahwa data yang akan diuji dalam tiap variabel terdistribusi secara normal dengan menggunakan grafik histogram, plot, dan tes *Kolmogorof-Smirnov* (Uji K-S).

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya atau antar variabel bebas tidak boleh saling mempengaruhi dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan persebaran deskripsi data dari satu pengamatan ke pengamatan lain dengan menggunakan grafik *Scatterplot*.

2) Uji *Goodness of Fit* Model Penelitian

a) Analisis Koefisien Korelasi (R)

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.

b) Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen pada suatu model persamaan regresi. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square*.

c) Uji Statistik f

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen.

d) Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen.

**3.5.1. Sarana Yang Digunakan**

Pada penelitian ini, untuk menguji hubungan antar variabel berdasarkan model penelitian yang dibuat, penulis menggunakan program komputer *Microsoft Excel* dan *IBM SPSS Statistics*.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Gambaran Data Responden**

Responden yang ada dalam penelitian ini adalah pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu) yang aktif dalam pengadaan barang/jasa sebagai salah satu jabatan pada organisasi pengadaan sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018. Jabatan yang pada organisasi pengadaan ialah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada Kantor Pusat Setjen Kemenkeu dan seluruh unit vertikal Setjen Kemenkeu seluruh Indonesia. Kuesioner disebar secara dalam jaringan (*online*) dalam aplikasi dari google (google form).

Survey dalam jaringan (*online*) disebar melalui tautan <http://gg.gg/fzk06> yang disebar melalui media sosial, yaitu berupa grup aplikasi *Whatsapp* di mana anggotanya grup tersebut adalah pegawai yang termasuk sebagai organisasi pengadaan. Periode pengumpulan data dari responden ini ialah selama bulan oktober sampai dengan 1 Desember 2019. Jumlah kuesioner pada akhir 1 Desember 2019 adalah dengan total sebanyak 51 responden. Data tersebut digunakan sebanyak 50 responden, dengan 1 responden tidak dimasukkan karena tidak termasuk dalam anggota organisasi pengadaan. Jumlah responden final sebanyak 50 responden sudah mencukupi dengan berdasar pada Sekaran (2006: 264) yang mensyaratkan minimal 40 responden.

### 3.2. Pengujian Hipotesis

Setelah hasil responden didiskripsikan dengan statistik deskriptif dan telah dilakukan uji validitas serta uji reliabilitas, maka selanjutnya dilakukan serangkaian ujian untuk menguji hipotesis. Ujian-ujian tersebut adalah sebagai berikut.

#### 3.2.1. Uji Asumsi Klasik

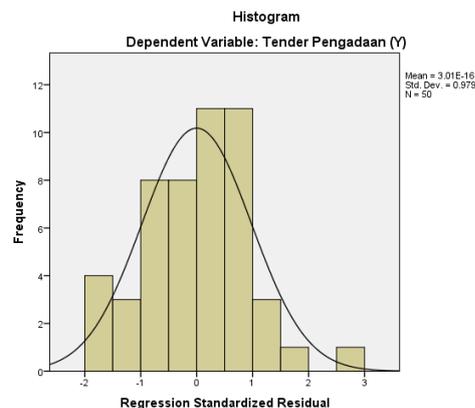
Untuk mengetahui apakah model regresi yang dihasilkan merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias terbaik maka perlu dilakukan pengujian gejala penyimpangan dengan asumsi model klasik. Asumsi klasik pertama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

##### 3.2.1.1. Uji Normalitas

Digunakan untuk melihat apakah data yang dipakai dalam penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode grafik dan uji *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test*.

##### 1) Metode Grafik Histogram.

Hasil uji normalitas dengan grafik histogram dapat dilihat pada Gambar berikut



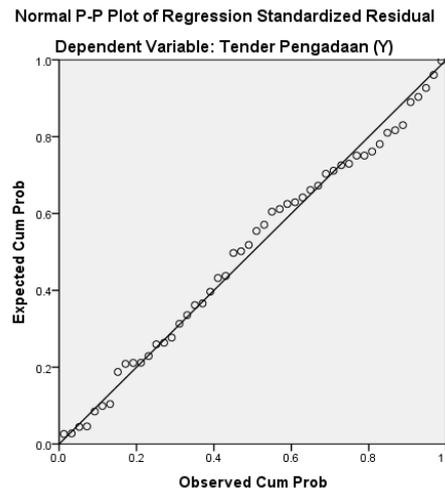
Sumber: Diolah dari data primer dengan Aplikasi SPSS

Berdasarkan grafik histogram gambar diatas, pola residual tidak memiliki kecondongan dan membentuk gunung atau lonceng yang sempurna. Maka, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa residual pada persamaan regresi terdistribusi secara normal. Dapat dilihat pada hasil pengujian, gunung / lonceng yang sempurna dengan cenderung ke arah kanan berarti penelitian ini sudah memenuhi standar normalitas yang dipersyaratkan.

##### 2) Metode Grafik *Normal P-P Plot of Regeression Standardized Residual*

Hasil dari uji normalitas persamaan regresi dengan metode *Normal P-P Plot of Regeression Standardized Residual* menjelaskan bahwa model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan grafik pada Gambar 2, diketahui bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, dan tidak terdapat titik-titik yang menyebar secara acak tak beraturan. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan kali ini telah sesuai dengan kaidah normalitas.

**Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Metode Grafik Normal P-P Plot**



Sumber: Diolah dari data primer dengan Aplikasi SPSS

3) Metode Kolmogorov-Smirnov

Uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS untuk melihat nilai signifikansi residual data. Jika nilai *p-value* > 0,05 maka data residual tersebut terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai *p-value* < 0,05 maka data residual tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas metode *Kolmogorov-Smirnov* disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Metode *Kolmogorov-Smirnov Test* One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.45012021
	Absolute	.067
Most Extreme Differences	Positive	.065
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.473
Asymp. Sig. (2-tailed)		.979

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Diolah dari data primer dengan Aplikasi SPSS

Dari hasil diatas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,473 dengan signifikansi sebesar 0,979. Karena nilai signifikansi dari pengujian Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,979 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**3.2.1.2. Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dalam mode regresi. Model regresi yang baik tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Adanya gangguan multikolinieritas dapat diketahui dengan menganalisis *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Penelitian yang baik harus mampu menghasilkan nilai VIF kurang dari 10 (VIF < 10) dan angka *Tolerance* > 0,10 sehingga menjelaskan model regresi bebas dari

multikolinieritas. Asumsi klasik mensyaratkan tidak adanya multikolinieritas sehingga hasil pengujian harus menunjukkan nilai  $VIF < 10$  dan angka  $Tolerance > 0,10$ . Hasil uji Multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Penerapan E-Procurement (X1)	.822	1.217
Kompetensi Pelaku (X2)	.822	1.217

a. Dependent Variable: Tender Pengadaan (Y)

Sumber: Diolah dari data primer dengan Aplikasi SPSS

Tabel 3 di atas menunjukkan hasil uji multikolinieritas persamaan regresi penelitian ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa angka  $Tolerance$  masing-masing variabel bebas memiliki nilai lebih besar dari 10% (angka  $Tolerance > 0,1$ ). Sejalan dengan hasil  $tolerance$ , nilai  $VIF$  juga nilai lebih kecil dari 10 ( $VIF < 10$ ). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada masing-masing variabel bebas di dalam penelitian ini.

### 3.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas

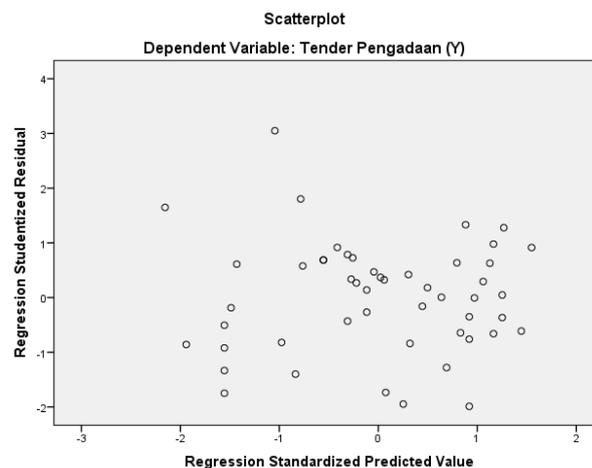
Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Grafik *Scatterplot*.

Pada dasarnya, uji heteroskedastisitas dengan metode grafik *Scatterplot* adalah dengan melihat antara nilai prediksi variabel bebas yaitu  $ZPRED$  dengan residunya  $SRESID$ . Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas menggunakan metode ini adalah:

- Jika terdapat pola tertentu pada grafik *Scatterplot* seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, menyebar, kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas pada grafik *Scatterplot* serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam gambar berikut ini.

**Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode *Scatterplot***



Sumber: Diolah dari data primer dengan Aplikasi SPSS

Gambar 3 menunjukkan grafik *Scatterplot* persamaan regresi menggunakan bantuan SPSS. Grafik

tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi sehingga data dapat diolah lebih lanjut.

### 3.2.2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun parsial. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis koefisien determinasi, analisis koefisien korelasi, uji statistik F, uji statistik t, dan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel penerapan *E-Procurement* dan Kompetensi Pelaku Pengadaan terhadap Tender Pengadaan barang/jasa yang berulang di Setjen Kemenkeu.

#### 3.2.2.1. Analisis Koefisien Korelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Nilai korelasi tersebut dapat diketahui dengan melihat nilai R pada hasil analisis persamaan regresi. Sugiyono (2015: 64) menyebutkan bahwa dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi dari hasil analisis regresi, peneliti dapat menggunakan skala interval nilai koefisien regresi (R). Berikut adalah hasil uji koefisien korelasi pada Tabel berikut.

**Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Korelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783 <sup>a</sup>	.613	.597	2.50171	2.072

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pelaku (X2), Penerapan E-Procurement (X1)

b. Dependent Variable: Tender Pengadaan (Y)

Sumber: Diolah dari data primer dengan Aplikasi SPSS

Dari Tabel 4, uji koefisien korelasi pada penelitian ini menghasilkan besaran R adalah 0,783, R *square* sebesar 0,613, *Adjusted R Square* sebesar 0,597 dan *Standard Error of The Estimate* adalah 2,50171. Untuk mengetahui seberapa besar korelasi variabel independen terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan tabel berikut ini:

**Tabel 5 Dasar Pengambilan Keputusan Korelasi**

No	Nilai Korelasi (R)	Tingkat Hubungan
1	0,000 – 0,199	Sangat Lemah
2	0,200 – 0,399	Lemah
3	0,400 – 0,599	Cukup
4	0,600 – 0,799	Kuat
5	0,800 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Diolah dari data primer dengan Aplikasi SPSS

Maka, dengan berdasarkan Tabel 5 dan menggunakan dasar pengambilan keputusan korelasi pada tabel 4 dari Siregar (2014: 89), dengan koefisien R sebesar 0,783 dapat disimpulkan bahwa nilai R tergolong dalam korelasi yang kuat. Hal ini berarti variabel penerapan *E-Procurement*, dan kompetensi pelaku pengadaan secara bersama-sama memiliki korelasi yang kuat terhadap variabel terjadinya Tender pengadaan barang/jasa yang berulang di Setjen Kemenkeu.

#### 3.2.2.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih (X1, X2, X3.....Xn) dengan satu variabel terikat (Y). Analisis ini merupakan pengembangan dari analisis regresi linear sederhana yang hanya digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk

memprediksi nilai variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan dan juga untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas apakah bersifat positif atau negatif. Dari hasil penelitian di atas, persamaan yang digunakan untuk analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y : variabel terikat

X1 : variabel bebas ke-1

X2 : variabel bebas ke-2

Xn : variabel bebas ke-n

a : konstanta, yaitu harga Y jika X = 0

b : koefisien regresi, yaitu nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y.

Dari hasil penelitian dan rumus untuk regresi linear berganda di atas, maka persamaan regresi untuk penelitian ini dapat dijelaskan Tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 6 Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.812	2.257		1.689	.098
1 Penerapan E-Procurement (PE)	.434	.113	.386	3.859	.000
Kompetensi Pelaku (KP)	.595	.111	.538	5.373	.000

a. Dependent Variable: Tender Pengadaan (TD)

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$TD = 3.812 + 0.434 PE + 0.595 KP$$

Keterangan :

- PE : Penerapan e-Procurement
- KP : Kompetensi Pelaku
- TD : Tender Pengadaan

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefiensi regresi variabel Penerapan e-Procurement (PE) adalah sebesar 0.434, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari Penerapan e-Procurement mengalami kenaikan 1 poin, maka nilai dari Tender Pengadaan akan mengalami kenaikan sebesar 0.434 poin. Begitupula sebaliknya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari Penerapan e-Procurement mengalami penurunan 1 poin, maka nilai dari variabel Tender Pengadaan akan mengalami penurunan sebesar 0.434 poin. Dalam hal ini pengaruh dari variabel independen Penerapan e-Procurement adalah berbanding lurus dengan Tender Pengadaan, artinya semakin meningkat Penerapan e-Procurement, maka nilai Tender Pengadaan juga akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.
2. Koefiensi regresi variabel Kompetensi Pelaku (KP) adalah sebesar 0.595, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari Kompetensi Pelaku mengalami kenaikan 1 poin, maka nilai dari Tender Pengadaan akan mengalami kenaikan sebesar 0.595 poin. Begitupula sebaliknya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari Kompetensi Pelaku mengalami penurunan 1 poin, maka nilai dari variabel Tender Pengadaan akan mengalami penurunan sebesar 0.595 poin. Dalam hal ini pengaruh dari variabel independen Kompetensi Pelaku adalah berbanding lurus dengan Tender

Pengadaan, artinya semakin meningkat Kompetensi Pelaku, maka nilai Tender Pengadaan juga akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.

### 3.2.2.3. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi *adjusted R<sup>2</sup>*. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang semakin mendekati 1 berarti bahwa sumbangan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat semakin besar.

**Tabel 7 Analisis Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783 <sup>a</sup>	.613	.597	2.50171	2.072

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pelaku (KP), Penerapan E-Procurement (PE)

b. Dependent Variable: Tender Pengadaan (TD)

Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat dilihat pada Tabel 7 di atas. Berdasarkan tabel tersebut, nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,597. Nilai tersebut menunjukkan besarnya pengaruh variabel-variabel bebas yaitu variabel penerapan *E-Procurement* dan kompetensi pelaku pengadaan terhadap terhadap variabel Tender pengadaan barang/jasa yang berulang adalah sebesar 59,7% sedangkan sisanya yaitu sebesar 40,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

### 3.2.2.4. Uji Statistik F (Pengujian Model Secara Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama dan simultan dalam mempengaruhi variabel terikat. Untuk menentukan signifikansi, maka uji dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. Nilai F-tabel pada penelitian ini yaitu mempertimbangkan nilai signifikansi 0,05 dan nilai  $df_1$ . Variabel-variabel bebas dalam model persamaan regresi dikatakan mempunyai pengaruh signifikan secara simultan dan bersama-sama terhadap variabel terikat apabila nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel ( $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ). Hasil uji statistik F penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 8 Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	466.829	2	233.414	37.295	.000 <sup>b</sup>
	Residual	294.151	47	6.259		
	Total	760.980	49			

a. Dependent Variable: Tender Pengadaan (TD)

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Pelaku (KP), Penerapan E-Procurement (PE)

Sumber: Diolah dari data primer dengan Aplikasi SPSS

Tabel I8 menunjukkan besaran F-hitung adalah sebesar 37.295 yang didapat dari persamaan regresi dengan aplikasi SPSS. Selanjutnya, F-tabel dapat diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Nilai  $df_1$  diperoleh dengan rumus  $df_1 = k-1$ , dimana k adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat (dalam penelitian ini variabel bebas sebanyak 2 buah dan variabel terikat sebanyak 1 buah) sehingga nilai  $df_1$  adalah sebesar 2.
- 2) Nilai  $df_2$  diperoleh dengan menggunakan rumus  $df_2 = n-k$ , dengan n adalah jumlah responden (dalam penelitian ini responden yang digunakan berjumlah 50 orang, dan nilai k adalah 3) sehingga diperoleh nilai  $df_2$  sebesar 47.
- 3) Berdasarkan tabel statistik Titik Persentase Distribusi F dengan signifikansi 5% (0,05),  $df_1$  sebesar 2,

dan  $df_2$  sebesar 47, maka diperoleh F-tabel sebesar 2,79.

Berdasarkan perbandingan F-hitung dan F-tabel diketahui bahwa nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel ( $37,259 > 2,79$ ), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan bersama-sama antara variabel penerapan *E-Procurement* dan kompetensi pelaku pengadaan terhadap variabel Tender pengadaan barang/jasa yang berulang.

**3.2.2.5. Uji Statistik t (Pengujian Model Secara Parsial)**

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Priyatno (2013: 73) menjelaskan bahwa terdapat dua cara untuk melakukan uji t, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi hasil pengujian dengan nilai  $\alpha$  atau dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Nilai t-tabel dalam persamaan regresi ini menggunakan sig. 0,05 dan *degree of freedom* (df) sebesar 47 (jumlah responden dikurangi jumlah variabel) maka diperoleh nilai t-tabel adalah sebesar 1,675. Dengan metode pertama, jika nilai t-hitung > t-tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan metode kedua, jika Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat Tabel berikut ini.

**Tabel 9 Hasil Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.812	2.257		1.689	.098
1 Penerapan E-Procurement (PE)	.434	.113	.386	3.859	.000
Kompetensi Pelaku (KP)	.595	.111	.538	5.373	.000

a. Dependent Variable: Tender Pengadaan (TD)

Sumber: Diolah dari data primer dengan Aplikasi SPSS

Berdasarkan uji t yang menggunakan aplikasi SPSS pada Tabel 9 tersebut di atas, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa variabel penerapan *E-Procurement* (PE) memiliki nilai hasil uji t > dari t-tabel dan *p-value* < 0,05, dan variabel kompetensi pelaku pengadaan (KP) memiliki nilai hasil uji t > dari t-tabel dan *p-value* < 0,05. Hal tersebut dirangkum dalam tabel 10 berikut ini.

**Tabel 10 Hasil Uji t Dalam Tabel**

Kode Var	Nama Variabel Independen	cara pertama			cara kedua		
		hasil uji t	t-tabel	Hasil	Hasil Sig.	A	Hasil
PE	Penerapan <i>E-Procurement</i>	3.859	1.675	Diterima	0.000	0.05	Diterima
KP	Kompetensi Pelaku Pengadaan	5.373	1.675	Diterima	0.000	0.05	Diterima

Sumber: Diolah dari data primer dengan Aplikasi SPSS

Setelah uji t, kemudian penelitian dilanjutkan dengan pengujian terhadap hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

- 1) H1: Penerapan *E-Procurement* Berpengaruh Signifikan Terhadap Tender Pengadaan Barang/Jasa yang berulang.

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai t-hitung dari uji parsial pengaruh penerapan *E-Procurement* terhadap Tender pengadaan barang/jasa yang berulang adalah sebesar 3.859 atau lebih besar dari nilai t-tabel yang sebesar 1.675. Selain itu, dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti di bawah nilai signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05. Hal ini berarti variabel penerapan *E-Procurement* berpengaruh positif signifikan terhadap Tender pengadaan barang/jasa

yang berulang. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan diawal penelitian bahwa penerapan *E-Procurement* berpengaruh signifikan terhadap Tender pengadaan barang/jasa yang berulang dinyatakan DITERIMA karena nilai  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  dan  $p\text{-value}$  di bawah 0,05.

2) H2 : Kompetensi Pelaku Pengadaan Berpengaruh Signifikan Terhadap Tender Pengadaan Barang/Jasa yang Berulang.

Berdasarkan Tabel IV.27 dapat diketahui bahwa nilai  $t\text{-hitung}$  dari uji parsial pengaruh kompetensi organisasi pengadaan terhadap Tender pengadaan barang/jasa yang berulang adalah sebesar 5.373 lebih besar dari nilai  $t\text{-tabel}$  yang sebesar 1,675. Selain itu, dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti di bawah nilai signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05. Hal ini berarti variabel kompetensi organisasi pengadaan berpengaruh positif signifikan terhadap Tender pengadaan barang/jasa yang berulang. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang diajukan diawal penelitian bahwa kompetensi organisasi pengadaan berpengaruh signifikan terhadap Tender pengadaan barang/jasa yang berulang dinyatakan DITERIMA karena nilai  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  dan  $p\text{-value}$  di bawah 0,05.

**Tabel 11 Ringkasan Kesimpulan Hipotesis**

	Hipotesis	Hasil Uji
H1	Penerapan <i>E-Procurement</i> berpengaruh signifikan terhadap Tender pengadaan barang/jasa yang berulang	Diterima
H2	Kompetensi pelaku pengadaan berpengaruh signifikan terhadap Tender pengadaan barang/jasa yang berulang	Diterima

Sumber: Diolah dari data primer

### 3.2.3. Intepretasi Hasil

Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

#### 1. Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Tender Pengadaan Barang/Jasa yang Berulang.

Hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa penerapan *E-Procurement* berpengaruh signifikan positif terhadap terjadinya Tender pengadaan barang/jasa yang berulang. Dengan maksud penerapan *E-procurement* menjadi faktor atau penyebab tender pengadaan barang/jasa yang berulang pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Kesalahan memang dapat diminimalisasi, namun dengan konsekuensi Tender harus dilaksanakan beberapa kali untuk mendapatkan pemenang dengan lolos semua persyaratan administrasi. Penerapan *E-Procurement* menuntut syarat-syarat administrasi tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga secara elektronik. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa penerapan *E-Procurement* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tender pengadaan barang/jasa yang berulang.

Dari hasil analisis regresi dapat dianalisa bahwa nilai koefisien beta ( $B_1$ ) adalah sebesar 0.434 dengan  $p\text{-value}$  sebesar 0.000 di mana lebih kecil dari 0,05. Hasil ini artinya penerapan *E-Procurement* berpengaruh signifikan terhadap Tender pengadaan barang/jasa yang berulang sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

#### 2. Pengaruh Komptensi Pelaku Pengadaan Terhadap Tender Pengadaan Barang/Jasa yang Berulang.

Hasil penelitian menunjukkan dari hasil analisis regresi, nilai koefisien beta ( $B_1$ ) adalah sebesar 0,595 di mana lebih besar dari  $t\text{-tabel}$  sebesar 0,1675 dan dengan  $p\text{-value}$  sebesar 0,000 di mana lebih kecil dari 0,05. Hal ini artinya kompetensi pelaku pengadaan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap terjadinya Tender pengadaan barang/jasa yang berulang. Dengan maksud Komptensi Pelaku Pengadaan menjadi faktor atau penyebab tender pengadaan barang/jasa yang berulang pada Sekretariat

Jenderal Kementerian Keuangan.

Hal ini menunjukkan sejalan dengan hipotesis dari penulis dan sejalan dengan penelitian Herriyanto (2012: 70) yang menyebutkan bahwa “kompetensi SDM pelaksana di dalam Pemprov DKI Jakarta berada di urutan pertama sebagai faktor menyebabkan terlambatnya penyerapan belanja modal”. Astuti (2012: 65) menambahkan bahwa “semakin besar keahlian, ketrampilan, dan pengetahuan akan tugas – tugas yang dimiliki pegawai maka akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut”.

Berdasarkan jawaban dari 50 responden, mayoritas jawaban responden ada pada jawaban setuju dilihat dari Tabel 11. Dari hasil jawaban ini, kompetensi pelaku pengadaan yang tersusun dari pengetahuan mengenai pengadaan, kemampuan dan pengalaman dalam pekerjaan, komunikasi, ketrampilan ketika melaksanakan pekerjaan, serta pemahaman akan aplikasi dan sistem pengadaan terbaru memberikan pengaruh positif terhadap terjadinya Tender pengadaan barang/jasa yang berulang.

Kompetensi pelaku pengadaan berpengaruh terhadap terjadinya Tender pengadaan yang berulang di Setjen Kemenkeu disebabkan karena beberapa hal. Pertama, pengetahuan responden mengenai proses pelaksanaan pengadaan masih kurang mencukupi. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden akan pertanyaan variabel KP1 adalah sebesar 2,4% yang artinya responden mengakui kekurangan mereka akan pengetahuan pengadaan. Kedua, 76% responden adalah pegawai dengan usia di atas 31 tahun. Untuk usia pegawai di atas 31 tahun memang memiliki pengalaman yang bervariasi, namun kemampuan mereka untuk menangkap dan mengikuti teknologi terbaru tentu menjadi kendala tersendiri. Mengingat kegiatan Tender pengadaan saat ini mewajibkan harus menggunakan sistem elektronik, maka kompetensi pegawai terkait dengan aplikasi-aplikasi pengadaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya Tender pengadaan yang berulang.

## **V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *E-Procurement* berpengaruh signifikan/ positif terhadap terjadinya Tender pengadaan barang/jasa yang berulang. Dengan maksud penerapan *E-procurement* menjadi faktor atau penyebab tender pengadaan barang/jasa yang berulang pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan Tabel 11 bahwa nilai t-hitung dari uji parsial pengaruh penerapan *E-Procurement* terhadap Tender pengadaan barang/jasa yang berulang adalah sebesar 3.859 atau lebih besar dari nilai t-tabel yang sebesar 1.675. Selain itu, dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti di bawah nilai signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05.
2. Kompetensi pelaku pengadaan terbukti berpengaruh signifikan/ positif terhadap terjadinya Tender pengadaan barang/jasa yang berulang. Dengan maksud Kompetensi pelaku pengadaan menjadi faktor atau penyebab tender pengadaan barang/jasa yang berulang pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan Tabel IV.27 dapat diketahui bahwa nilai t-hitung dari uji parsial pengaruh kompetensi organisasi pengadaan terhadap Tender pengadaan barang/jasa yang berulang adalah sebesar 5.373 lebih besar dari nilai t-tabel yang sebesar 1,675. Selain itu, dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti di bawah nilai signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05.

### **5.2 Keterbatasan**

Terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh penulis sehingga memengaruhi hasil penelitian ini. Beberapa keterbatasan yang menjadi kendala bagi penulis adalah:

1. Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu yang relatif singkat sehingga evaluasi-evaluasi lanjutan untuk menanggapi responden memiliki porsi waktu yang dialokasikan relatif kecil.

Hal ini memungkinkan masukan-masukan dari responden tidak dapat diakomodasi secara merata.

2. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang menggunakan keseluruhan pertanyaan secara tertulis, dan tidak adanya wawancara yang lebih dalam untuk tindak lanjutnya. Hal ini menyebabkan penulis hanya menyimpulkan seluruh hasil penelitian ini berdasarkan jawaban tertulis atas kuesioner tersebut.
3. Kuesioner hampir seluruhnya dibagikan secara daring (*online*) melalui *google form*, sehingga penulis tidak memiliki kendali dan pengawasan secara langsung terhadap responden yang diteliti. Maka dari itu, perbedaan interpretasi atas pertanyaan yang diajukan dan maksud tujuan pertanyaan menjadikan hasil penelitian bias karena kebiasaan-kebiasaan atas cara menjawab responden.
4. Kuesioner penelitian ini sebenarnya ditujukan untuk seluruh unit kerja Setjen Kemenkeu yang tersebar di Indonesia, namun dalam kuesioner penulis tidak mencantumkan lokasi tempat responden bekerja. Hal ini dikarenakan penulis khawatir responden akan enggan mengisi kuesioner mengingat kantor vertikal yang berada di luar Pulau Jawa mayoritas satu kantor dalam satu provinsi sehingga identitas responden dapat langsung diketahui.
5. Kuesioner yang disebar tidak terdapat lokasi tempat responden bekerja sehingga belum mampu menggambarkan kondisi Setjen Kemenkeu secara keseluruhan.
6. Variabel yang digunakan untuk menguji terjadinya Tender pengadaan barang/jasa yang berulang hanya berjumlah dua variabel dan dengan sampel yang terbatas. dua variabel tersebut hanya mampu menggambarkan terjadinya Tender pengadaan barang/jasa yang berulang sebesar 59,7%, sehingga masih terdapat 40,3% yang harus dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya.

### 5.3 Saran

Melihat simpulan dan dengan memperhatikan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

#### Untuk Setjen Kemenkeu

- a. Variabel penerapan *E-Procurement* terbukti berpengaruh secara positif signifikan terhadap terjadinya Tender pengadaan barang/jasa yang berulang. Maka dari itu, organisasi pengadaan menyusun daftar penyedia jasa yang kooperatif ataupun yang masuk dalam daftar hitam untuk dapat dilaporkan secara hirarki dari organisasi terbawah sampai dengan Kantor Pusat Setjen Kemenkeu. Selain itu, Kantor Pusat Setjen Kemenkeu menerbitkan peraturan yang isinya mewajibkan setiap organisasi pengadaan perlu membuat jurnal mengenai setiap pengadaan sehingga evaluasi dapat segera dilaksanakan.
  - b. Variabel kompetensi pelaku pengadaan terbukti berpengaruh secara positif signifikan terhadap terjadinya Tender pengadaan barang/jasa yang berulang. Menindaklanjuti hal tersebut, pembinaan dan asistensi secara berkala terhadap anggota organisasi pengadaan yang aktif maupun yang tidak aktif sehingga pengetahuan mengenai pengadaan terbaru pun tidak tertinggal. Kedua, kantor pusat Setjen Kemenkeu melakukan *try out* / pelatihan daring (*online*) mengenai tata cara pelaksanaan Tender secara elektronik. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman dari organisasi pengadaan mengenai seluruh proses dan ketentuan tentang pengadaan secara elektronik.
2. **Untuk Penelitian Selanjutnya**

- a. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang belum diteliti oleh penulis yang berpengaruh terhadap terjadinya Tender pengadaan barang/jasa yang berulang, seperti perencanaan pengadaan, jenis pengadaan, hasil pengawasan dan temuan auditor baik internal maupun eksternal, dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan nilai *adjusted R<sup>2</sup>*.
- b. Melakukan penyempurnaan terhadap kuesioner-kuesioner yang akan digunakan di kemudian hari, seperti kebijakan organisasi terhadap pengadaan yang gagal/berulang, kecenderungan organisasi untuk melakukan belanja modal atau belanja barang dalam pengadaan, dan lain-lain, sehingga mampu menggambarkan kondisi variabel yang akan dilakukan penelitian secara lebih jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan terhadap responden.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, Febby Fuji & Zunaidah. 2012. Pengaruh Perubahan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 10 (20), 59-80.
- Dyah Ni Wahyu, Ryan Tri Komara, Sri Djuniati. 2015. Analisa Variabel Kegagalan Kontraktor Di Kota Pekanbaru Dalam Proses Evaluasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik ( E- Procurement ). *Jom FTEKNIK*, 2 (2), 9-10.
- Faisol, Imam Agus., Tarjo., Musyarofah, Siti. 2014. Pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik. *JAFFA* 2 (2). 2-10.
- Hall, Richard H. 1980. Effectiveness Theory and Organizational Effectiveness. *Journal of Applied Behavioral Science*, 16
- Herryanto, Hendris. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Iskandar, A. Ika. 2013. *Analisis Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor Dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Karyasa, IN.R., Salain, IM. Alit K., Nadiasa, Mayun. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Badung. *Jurnal Spektran*, 2 (1), 19-21.
- Lumanauw Novy, Yosi Winosa. 2016. *Jokowi Kecewa Penyerapan K/L Lamban*. Diunduh tanggal 19 Agustus 2019, <https://investor.id/archive/jokowi-kecewa-penyerapan-kl-lamban>.
- Panayiotou, Nikolaos A., Gayialis, Sotiris P., Tatsiopoulos, Ilias P. 2004. An e-procurement system for governmental purchasing. *International Journal of Production Economics*, 90, 79–102.
- Santoso, Setiawan Budi. 2015. *Evaluasi atas Ketercapaian Tujuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik pada Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara-STAN.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2013. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. *International Journal*, 6, 21-25.
- Siswanto, Adrianus Dwi., Rahayu, Sri Lestari. 2010. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. *Kajian. Kementerian Keuangan*, 1-5.
- Taufik, Muhammad., Darwanis. Fahlevi, Heru. 2016. Pengaruh Penerapan e-Procurement dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal (Studi pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5 (1), 18-20 .
- Vaidya, Kishor., Sajeev, A. S. M., Callender, Guy. 2006. Critical Factors That Influence E-Procurement Implementation Success in The Public Sector. *Journal of Public Procurement*, 6 (3), 70-99.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.